

Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015

Studi Kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot

Kecamatan Tanjung Harapan

Kabupaten Paser

Ahmad Sahid¹

Abstrak

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui perbandingan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015 (studi kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan dan Kabupaten Paser). Latar belakang dari penelitian ini adalah perbedaan tingkat partisipasi politik antara Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot. Melihat fenomena tersebut, maka penulis mencoba untuk menganalisis lebih dalam untuk melihat Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015 (studi kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dengan sampel di Desa Tanjung Aru berjumlah 95 orang dan sampel di Desa Selengot 89 orang menggunakan random sampling.

Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif dan analisis kuantitatif menggunakan analisis cross tab (tabulasi silang). Stelah menggunakan rangkaian analisis kualitatif dan kuantitatif temuan dari penelitian ini adalah perbedaan tingkat partisipasi politik antara Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot yang menunjukkan perbandingan partisipasi politik dalam kegiatan kampanye dan menggunakan hak pilih.

Kata Kunci : partisipasi politik, Desa Tanjung Aru, Desa Selengot, pemilihan kepala daerah.

Pendahuluan

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Buapati dan Wakil Buapati Kabupaten Paser Tahun 2015 yang lalu, ada 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan pertama Ir. H. Bambang susilo, M.M dan Ir. H. Sulaiman Eva Mereukh, M.AP (bangsule), pasangan kedua Drs. H.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.email: sahid29051995@gmail.com

Yusriansyah Syarkawi, M.Si dan H.M. Mardikansyah, M.AP (yusmar). Data KPUD Kabupaten Paser menunjukkan jumlah DPT Kabupaten Paser sebanyak 178.181 orang dengan pengguna hak pilih sebanyak 120.450 dengan tingkat partisipasi 67, 60%. Pilkada di Kabupaten Paser merupakan pilkada yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi di Kalimantan Timur.

Jumlah DPT Kecamatan Tanjung Harapan 6.218 orang dan pengguna hak pilih 4.735 dengan tingkat partisipasi 76,15%, walaupun dengan tingginya tingkat partisipasi di Kecamatan Tanjung Harapan namun ada desa yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dan ada desa yang tingkat partisipasinya masih rendah, hal ini terjadi di Desa Tanjung Aru dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dan Desa selengot dengan tingkat partisipasi yang rendah.

Jumlah DPT Desa Tanjung Aru sebanyak 1988 orang dan pengguna hak pilih 1.534 dengan tingkat partisipasi sebesar 77,16%, jika dibandingkan dengan Jumlah DPT Desa Selengot 796 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 531 orang dengan tingkat partisipasi 66,71%, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan tingkat partisipasi antara desa Tanjung Aru dan Desa Selengot sehingga penulis tertarik untuk meneliti tingkat partisipasi antara Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, sehingga ini membuktikan bahwa adanya perbedaan tingkat partisipasi sebesar 10.45%.

Kerangka Dasar Teori

Perbandingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:100) perbandingan adalah perbedaan atau selisih kesamaan, persamaan serta ibarat sedangkan membandingkan adalah menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya untuk mengetahui persamaan atau selisihnya. Dan perbandingan juga diartikan sebagai selisih kesamaan, ibarat, pedoman pertimbangan kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbangan yaitu menentukan bobot dari sesuatu obyek atau beberapa obyek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa obyek dimana untuk keperluan tersebut obyek atau obyek-obyek disejajarkan dengan alat pembandingannya.

Perbandingan Politik

Menurut Ronald H.Chilcote (2007:04) Perbandingan Politik (*comparative politics*) mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan antara lain adalah suku-suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi dan bebagai perserikatan.

Dalam konteks ilmu pemerintahan, S. Pamudji dalam Dede Mariana (2001:01) mengatakan bahwa kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbang, yaitu menentukan bobot dari suatu objek atau beberapa objek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata

pertimbangan, yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa objek, dimana untuk keperluan tersebut objek atau objek-objek yang disejajarkan dengan alat pembandingannya, dari pengertian ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek atau objek-objek disejajarkan dengan alat pembandingannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembanding.

Pendekatan Perbandingan Politik

Macridis dalam Ronald H. Chilcote (2007:78) pendekatan tradisional (*traditional approach*) yang secara historis saling menghubungkan fakta dan nilai dalam studi politik perbandingan. Pendekatan tradisional memfokuskan analisis pada struktur negara, pemilihan umum dan partai-partai politik.

Pendekatan perilaku (*behavioral approach*) yang merupakan sebuah reaksi terhadap spekulasi teori yang memberikan uraian penjelasan, kesimpulan, dan penilaian berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan dan standar-standar kekuasaan maupun etnosentrisme, formalisme, dan deskripsi barat yang menjadi karakteristik yang menjadi karakteristik pendekatan tradisional kontemporer.

Macridis dan Cox dalam Ronald H. Chicote (2007:79) Pendekatan paska behavioral suatu pendekatan empris yang sistematis termasuk perluasan skema-skema yang bersifat klasifikasi, konseptualisasi pada beragam tingkat abstraksi, penyusunan hipotesis, dan pengujian hipotesis melalui data empiris.

Partisipasi

Menurut UNDP dalam Haris (2007 : 57) Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi yang dilakukan warga negara tidak hanya pada tahapan implementasi/pelaksanaan, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan/formulasi kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo (2008 : 367) secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *contacting* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi

anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya.

Sementara itu, Milbart dan Goel dalam Miriam Budiarjo (2008:372) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, *spectator*. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, *gladiator*. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktifis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik disuatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994: 10-16) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- a. Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- b. *Lobby* yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
- c. Kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- d. *Contacting* yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
- e. Tindakan kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk disini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2007:144) , menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial dan kewajiban lainnya. Pertama adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan ekonomi, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.

Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Metode Penelitian

Untuk membandingkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot yang lengkap dan akurat penulis menggunakan metode penelitian kombinasi desain model *concurrent triangulation* yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dengan cara mencampur kedua metode.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Samplenya adalah seluruh daftar pemilih tetap Desa Tanjung Aru dan desa Selengot yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 yang tercatat sebanyak 1988 orang dengan sampel 95 orang., dan daftar pemilih tetap di Desa Selengot 796 orang dengan sampel 89 Menggunakan metode *Simple Random Sampling*.

Penelitian ini bersifat *comparative* dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif : (1) observasi, (2) kuesioner, (3) dokumentasi, (4) penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini merupakan fokus penelitian meliputi : (1) Mengikuti kegiatan kampanye, (2) Menggunakan Hak Pilih. Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk membandingkan tingkat partisipasi politik, maka penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif, yaitu (1) metode analisis inetraktif (2) *croos tab* (tabulasi silang). Dalam penelitian ini menggunakan skala nominal sebagai alat pengukur data. Mengenai kriteria atau skor menurut Singarimbun (1995: 110) masing-masing penelitian ada yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini dikelompokkan dalam skala 2 jenjang (jawaban a diberi nilai 1; jawaban b diberi nilai 2) untuk variabel X_1 dan X_2 kemudian skala 2 jenjang (jawaban a diberi nilai 1; jawaban b diberi nilai 2) untuk variabel Y .

Hasil dan Pembahasan

Data yang diperlukan dari para responden sangat beragam, hal ini dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan yang mendasar dari masing-masing responden (masyarakat). Untuk mengetahui apa saja yang mendasari masyarakat bersikap berbeda-beda maka di bawah ini akan diuraikan dan dijelaskan latar belakang masing-masing masyarakat baik jenis kelamin, pekerjaan, umur/usia dan pendidikan terakhir.

Hasil penelitian berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot dengan partisipasi masyarakat Tanjung Aru dalam mengikuti kampanye sebanyak 73 orang (76.84%). Sedangkan masyarakat yang tidak mengikuti kampanye di Desa Tanjung Aru sebanyak 22 orang (23.16%). Sedangkan di Desa Selengot partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye sebanyak 52 Orang (58.42%). Kemudian yang tidak mengikuti kampanye sebanyak 37 Orang (41.58%).

Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih lebih tinggi di Desa Tanjung Aru sebesar (87.37%) atau sebanyak 83 orang sedangkan Desa Selengot sebesar (57.30%) sebanyak 51 orang, kemudian yang tidak memberikan hak pilihnya sebesar (12.63%) sebanyak 12 orang alasan mereka adalah karena berada di luar daerah dan sibuk dengan pekerjaan. Sedangkan Desa Selengot memiliki tingkat partisipasi politik dalam menggunakan hak pilih sebesar (57.30%) sebanyak 51 orang, kemudian yang tidak menggunakan hak pilih mereka adalah sebesar (42.70%) sebanyak 38 orang.

Faktor pendidikan masyarakat memiliki pengaruh terhadap tindakan dan perilaku dalam mengikuti kampanye. Hal ini karena dorongan yang besar atau rasa ingin tahu dari para pemilih pemula yang rata-rata baru lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ingin mengikuti kampanye dan ingin ikut dalam menggunakan hak pilihnya, serta keterlibatan pemilih pemula sebagai anggota tim sukses dari masing-masing pasangan calon. Sedangkan Desa Selengot juga hampir sama dengan Desa Tanjung Aru namun karena tidak adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Selengot sehingga kebanyakan setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) banyak yang putus sekolah dan lebih memilih membantu orang tua mereka untuk membantu mencari nafkah di laut, sehingga keterlibatan pemilih pemula di Desa Selengot cenderung bersikap apatis dan tidak mau ikut campur dalam kegiatan-kegiatan selama masa pemilihan umum berlangsung.

Analisa Yang kedua adalah faktor kesadaran politik dari masyarakat Desa Tanjung Aru lebih dapat digolongkan partisipasi aktif dan Desa Selengot dapat di golongkan partisipasi pasif. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Tanjung Aru memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan diadakannya pemilihan sebagai sarana untuk mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat sehingga masyarakat di Desa Tanjung Aru sangat antusias

menyambut pesta demokrasi tersebut, berbeda dengan Desa Selengot yang masih kurang memberikan perhatian pada saat pemilihan calon kepala daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak, sehingga masyarakat Desa Selengot menjadi apatis hal ini disebabkan karena anggapan hasil dari pemilihan tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka.

Faktor status sosial (pekerjaan) di Desa Tanjung Aru memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan kampanye dan menggunakan hak pilihnya yang dapat dilihat dari hasil penelitian yang menggambarkan jenis pekerjaan dari masyarakat yang beragam yang memungkinkan mereka mengikuti kegiatan kampanye dan tidak mengikuti kegiatan kampanye karena masyarakat yang bekerja sebagai (PNS) tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye dikarenakan terikat oleh peraturan namun dari segi menggunakan hak pilih yang bekerja sebagai (PNS) ikut dalam menggunakan hak pilih mereka.

Sedangkan Desa Selengot status pekerjaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik mereka hal ini ditunjukan oleh hasil penelitian yang menggambarkan bahwa mayoritas yang mengikuti kegiatan kampanye adalah ibu rumah tangga hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan kampanye dilaksanakan di rumah warga sekitar dan pada saat kampanye dilaksanakan acara silaturahmi dan acara makan-makan bersama sehingga ibu-ibu menyediakan hidangan pada saat kampanye sehingga kebanyakan mereka mengikuti kegiatan kampanye lalu yang menggunakan hak pilih adalah mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga juga hal ini dikarenakan kondisi Desa yang sepi ketika mulai pagi hari hingga sore hari hal ini dikarenakan para lelaki turun ke laut untuk mencari nafkah, sehingga kebanyakan mereka lebih memilih ke laut dari pada ke (TPS).

Perbedaan dan persamaan dari partisipasi politik masyarakat Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot memiliki perbedaan yang tidak begitu berbeda dari status sosial (pekerjaan) yakni mayoritas bergerak disektor perikanan dan kelautan sehingga karakteristik masyarakat disana memiliki kesamaan, namun dari segi partisipasi politik memiliki perbedaan yang menjadi kendala di Desa Selengot ialah pola pikir masyarakatnya yang *money oriented* sehingga anggapan mereka jika tidak bekerja mereka tidak bisa menafkahi keluarga mereka sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap partisipasi politik untuk ikut dalam kegiatan kampanye atau penggunaan hak pilih masyarakat di Desa Selengot.

Analisa yang keempat adalah faktor kedekatan emosional yang ditunjukkan keterlibatan dalam kampanye dan penggunaan hak pilih sangat berpengaruh di Desa Tanjung Aru, hal ini dikarenakan salah satu anggota Dewan berasal dari Putra Daerah Tanjung Aru yang merupakan memiliki basis keluarga yang cukup besar di Desa Tanjung Aru sehingga kedekatan emosional di Tanjung Aru berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakatnya.

Sedangkan Desa Selengot tidak memiliki pengaruh dalam hal kedekatan emosional dikarenakan masyarakat Desa Selengot tidak memiliki hubungan kerabat/kekeluargaan dengan masing-masing pasangan calon ataupun ada hubungan kekerabatan dengan ketua tim sukses dari masing-masing pasangan calon faktor kedekatan emosional yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan kampanye dan menggunakan hak pilih. Di Desa Tanjung Aru dari hasil penelitian sebesar (46.57%) memiliki kedekatan emosional dengan anggota partai politik dan bahkan ada yang memiliki hubungan langsung dengan pasangan calon. Hal ini juga berpengaruh terhadap keikutsertaan mereka dalam mengikuti kegiatan kampanye dan menggunakan hak pilih mereka yang dapat dilihat dari hasil penelitian yang menggunakan hak pilih karena memiliki kedekatan emosional sebesar (40.96%) artinya kedekatan emosional juga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Aru.

Sedangkan di Desa Selengot faktor kedekatan emosional tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakatnya, hal ini dapat digambarkan dari hasil penelitian. Alasannya dikarenakan masyarakat disana tidak terlalu banyak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pasangan calon ataupun dari tim sukses dari masing-masing pasangan calon. Dari hasil penelitian dapat dilihat sebesar (23.07%) yang mengikuti kegiatan kampanye dan yang menggunakan hak pilih karena hubungan kerabat/keluarga sebesar (23.52%).

Perbandingan dari Desa Tanjung aru dan Desa Selengot ialah terletak di kader partai politik yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat di Desa Tanjung Aru dan juga peran dari elit politik yang memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Tanjung Aru juga memiliki peran dalam kegiatan pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Paser Tahun 2015, namun di Desa Selengot berbanding sebaliknya jika di Desa Tanjung Aru memiliki putra asli Desa Tanjung Aru sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser, di Desa Selengot tidak memiliki wakil dari desa mereka yang duduk di DPRD Kabupaten Paser sehingga tidak adanya saluran atau akses mereka dalam pengkaderan partai politik dan elit politik.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan penulis dapat dijabarkan dan disimpulkan mengenai perbandingan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Dearah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Politik mayarakat Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot dalam pemilihan Kepala Dearah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 yang terlihat dalam kegiatan kampanye dan penggunaan hak pilih.

- a. Partisipasi Politik masyarakat Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot dalam mengikuti kegiatan kampanye. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik di Desa Tanjung Aru dalam kegiatan kampanye lebih tinggi yakni sebesar (76.84%). Berbeda dengan Desa Selengot yang tingkat Partisipasi Politik dalam mengikuti kegiatan kampanye lebih rendah yakni sebesar (58.42%).
 - b. Partisipasi politik dalam menggunakan hak pilih antara Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot. Perbedaan tingkat partisipasi politik dalam menggunakan hak pilih juga menunjukkan hasil yang sama yakni partisipasi politik Desa Tanjung Aru lebih tinggi yakni sebesar (87.37%). Berbeda dengan Desa Selengot yang tingkat partisipasi politik dalam menggunakan hak pilihnya lebih rendah yakni (57.30%).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot.
 - a. Faktor pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Tanjung, sedangkan di Desa Selengot faktor pendidikan tidak berpengaruh.
 - b. Faktor kesadaran Politik berpengaruh terhadap partisipasi politik di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot.
 - c. Faktor status sosial (pekerjaan) berpengaruh terhadap partisipasi politik di Desa Tanjung Aru, sedangkan faktor sosial di Desa Selengot tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik.
 - d. Faktor kedekatan emosional berpengaruh terhadap partisipasi politik di Desa Tanjung Aru, sedangkan di Desa Selengot faktor kedekatan emosional tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sehingga penulis bermaksud memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang memperlihatkan perbandingan antara Desa Selengot dan Desa Tanjung Aru memiliki perbedaan tingkat partisipasi politik, hal ini demikian sangat perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya dapat tercapai secara optimal. Adapun yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk kedua Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Pusat dan Daerah harus memberikan perhatian yang lebih dalam dunia politik yang dapat meningkatkan partisipasi politik melalui rangsangan ataupun stimulus dana baik dana, kelembagaan, pelatihan dan sosialisasi politik tentang partisipasi khususnya dalam bidang politik sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dan merasa kurang percaya dengan hasil pemilihan umum.
 - b. Penyelenggaraan pemilihan umum baik dari KPU, KPUD, PPK, PPS sampai KPPS harus aktif, artinya mereka tidak hanya sebagai

- penyelenggara saja akan tetapi dapat berperan sebagai penggerak dan motivator di masyarakat sehingga sikap apatis dari masyarakat berubah menjadi sikap peduli.
- c. Pengawasan yang dilakukan badan pengawas pemilu (bawaslu) harus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan hasil pemilihan umum dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak terlalu mudah percaya dengan janji-janji politik dan masyarakat semakin selektif dan lebih mengedepankan masa depan untuk pembangunan yang lebih merata dan adil.
 - 2. Melihat dari pembahasan dan hasil penelitian bahwa perlu adanya pendidikan politik pada pemilih pemula agar mereka tidak hanya ikut-ikutan dalam pemilihan umum. Untuk itu kedepannya pemerintah perlu melakukan pendekatan dan perhatian khusus pada pemilih pemula agar kualitas dari pemilihan umum lebih baik dan dapat menambah tingkat partisipasi politik masyarakat jauh lebih tinggi. Cara yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan interaksi dan sosialisasi kepada para pemilih pemula karena masa depan bangsa ada ditangan mereka sehingga hal tersebut perlu dilakukan.
 - 3. Partisipasi yang rendah khususnya Desa Selengot dalam pemilihan umum khususnya dalam penggunaan hak pilih harus menjadi evaluasi pemerintah karena dengan rendahnya partisipasi dapat berdampak pada anggaran dikarenakan jika terjadi perolehan suara (<50%) dalam pelaksanaan pilkada tersebut harus diulang. Sehingga hal ini akan menjadi beban bagi pemerintah pusat, daerah dan juga menjadi beban masyarakat karena harus mengulang pemilihan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisis Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chilcote Ronald H. 2007. *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haris, Syamsudin ed. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Huntington, Samuel P, dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 2002. Jakarta: Balai Pustaka
- Mariana, Dede. 2001. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Surveil*. Yogyakarta: LP3ES.

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia.

Yusuf, Muri. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Sumber Internet

https://pilkada2015.kpu.go.id/paserkab/tanjung_harapan/tanjung_aru

https://pilkada2015.kpu.go.id/paserkab/tanjung_harapan/selengot